DOKUMEN RENSTRA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK



TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

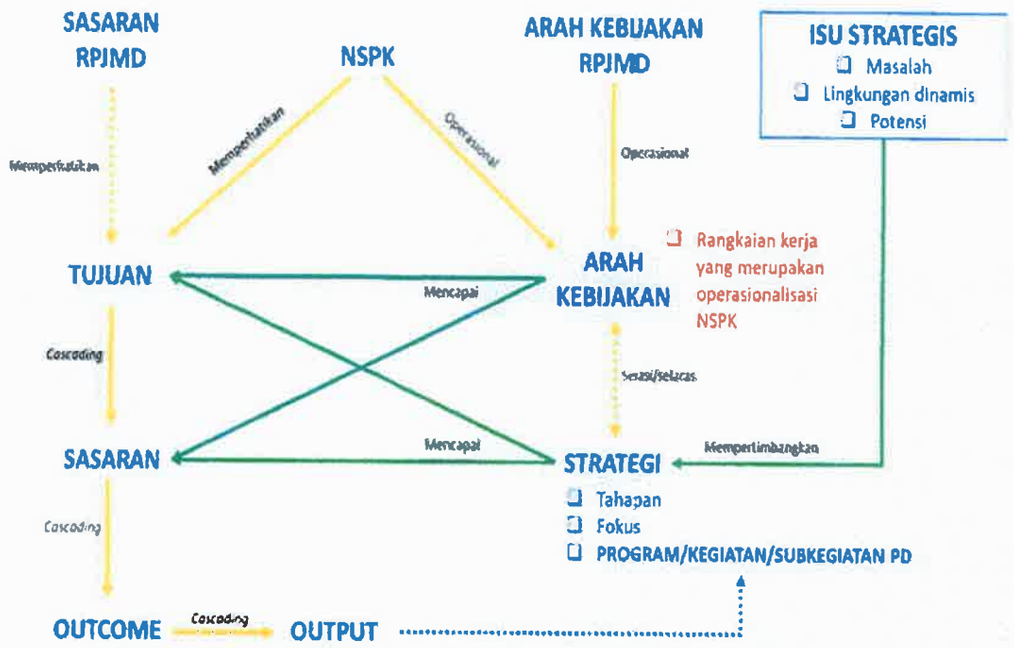
Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk nemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD). Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD tahun 2025-2029 maka perangkat daerah menyusun renstra PD tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Adapun konsep penyusunan Renstra OPD disajikan dalam bagan alir berikut:

Tabel 1. 1 Konsep Rensta PD



Sumber: Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Dasar hukum atau Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang – undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tantang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peratutan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup;
c. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan; dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
d. Kelompok Sasaran Layanan;
e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan;
2.2. Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah
a. Identifikasi Permasalahan;
b. Perumusan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah;
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA PD Tahun 2025 – 2029;

BAB IV PROGAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;
4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program Prioritas Pembangunan daerah;

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.

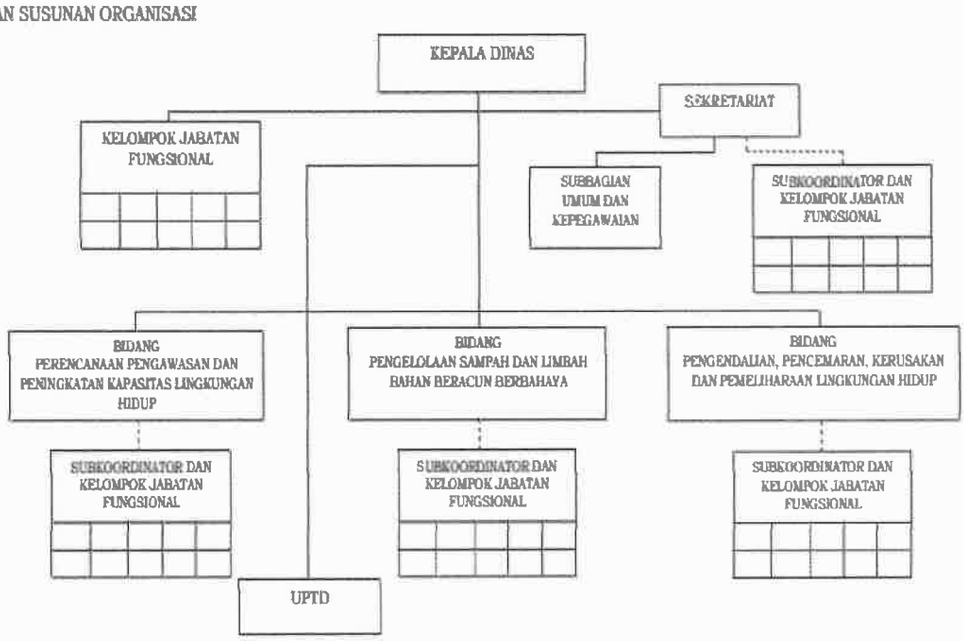
Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. pemberian dukungan atau penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. pelaksanaan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah;
h. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
i. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
j. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan persuratan;
b. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. meaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;

e. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang perencanaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten;
b. penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) kabupaten;
c. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
d. penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang PPLH kabupaten;
e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
f. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.

4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun berbahaya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyimpanan sementara limbah bahan beracun berbahaya;
b. pengumpulan limbah bahan beracun berbahaya dalam 1 (satu) daerah;

c. pengelolaan sampah;
d. penerbitan izin pendaur ulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
e. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.

5) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Bidang pengendalian, pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pencemaran, kerusakan dan peneliharaan Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
d. pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.

5) UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

I. TUGAS POKOK UPTD

Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Laboratorium Lingkungan.

I. FUNGSI UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Menyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;
2. Melaksanakan penerimaan/ pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian Laboratorium;
3. Melaksanakan pengembangan metode dan setandar analisis pengujian;

4. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;
5. Melaksanakan verifikasi data dan hasil pengujian Laboratorium;
6. Melaksanakan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitas (QA) atau quality control (QC) sesuai dengan standar yang berlaku;
7. Membantu penerapan ISO 17025: 2005 untuk mendapatkan akreditasidari Badan Akreditasi Nasional dan legalisasi dari instansi yang berwenang;
8. Membuat laporan dan saran atas quality analisis(QA) atau quality control (QC) untuk peningkatan kualitas Laboratorium;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

II. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

a. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

   Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.
   1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
   2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
   3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
   4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Keadaan Pegawai (SDM)

Untuk mengemban tugas dan fungsi Sumber daya manusia / pegawai Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 321 (tiga ratus dua puluh satu) orang terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang ASN, 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang tenaga harian lepas.

Tabel 2. 1 Jumlah Tenaga Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Latar Belakang Pendidikan

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	***2***	***3***	***4***
1	Pembina Tk I /IV B	S2 Manajemen	1
2	Pembina /IV A	S2 Manajemen	2
		S2 Kesehatan Lingkungan	1
3	Penata Tk I/ III d	S1 Ekonomi	2
		S2 Teknik Lingkungan	1
		S2 Rehabilitasi Pemeliharaan Bangunan	1
		S1 Teknik Lingkungan	1
		S1 Teknik Kimia	1
		S2 Teknik Lingkungan	1
		S1 Pertanian	1
4	Penata / IIIc	S1 Teknik Kimia S1 Teknik Lingkungan S1 Fisika S1 Sospol D3 Kearsipan	3 1 1 1 1
5	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	SMA / SMK	1
6	Penata Muda /III A	- S1 Ekonomi - S1 Sospol	2 3
7	Pengatur Tk I /II d	-SMA/ SMK	2
8	Pengatur /II c	- SMA/ SMK	3

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	JUMLAH
9	Pengatur Muda Tk I/II b	- SMA	12
10	Pengatur Muda /II a	- SMP	7
11	Juru Tk I/I d	- SMP	18
12	Juru I/Ic	- SMP/SD	25
13	PPPK Golongan V	- SMA / Sederajat	11
14	Tenaga Harian	- SMA/ SMK/S1	231
	J U M L A H		321

2) Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa Sarana Prasarana/ Peralatan Kerja Utama sebagaina diuraikan dalam tabel berikut

a. Sarana Gedung Kantor Luas 200 m2 terdiri dari :

Tabel 2. 2 Sarana Gedung Kantor

NO	URAIAN	JUMLAH/ SATUAN
1	Ruang Kerja Kepala Kantor	1 Ruang
2	Ruang Kerja Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH	1 Ruang
3	Ruang Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan kapasitas	1 Ruang
4	Ruang Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	1 Ruang
5	Ruang Kepala Sub. Bidang Tata Usaha	1 Ruang
6	Ruang rapat	1 Ruang
7	Ruang Tamu	1 Ruang
8	Mushola	1 Ruang
9	Gudang	1 Ruang
10	Garasi	3 Ruang
11	Ruang Perpustakaan	

NO	URAIAN	JUMLAH/ SATUAN
12	Green House	1 Ruang
13	Ruang Terbuka Karantina Tanaman	1 Ruang
14	Tempat Parkir	1 Ruang
15	Ruang Laboratorium	1 Ruang
16	Ruang loby sekretariat	1 Ruang
17	Ruang kantor Bank Sampah	1 Ruang
18	Ruang Menyusui	1 Ruang
19	Kamar Mandi / WC	4 Ruang

b. Prasarana/ Peralatan Kerja Utama

Tabel 2. 3 Prasarana / Peralatan Kerja

NO	URAIAN	JUMLAH/ SATUAN
1	Station Wagon	6 Unit
2	Truck + Attachament	23 Unit
3	Excavator	2 Unit
4	Loder	1 Unit
5	Buldoser	1 Unit
6	Gerobak Motor	34 Unit
7	Mesin Ketik	
8	Filling Kabinet	12 Unit
9	Almari Besi	6 Unit
10	Almari Kayu	4 Unit
11	Rak Kayu	8 Unit
12	Brankas	3 Unit
13	Jam mekanis	5 Unit
14	AC	19 Unit
15	Kipas Angin	1 Unit
16	Televisi	5 Unit

NO	URAIAN	JUMLAH/ SATUAN
7	LCD Proyektor	2 Unit
18	Laptop	11 Unit
19	Komputer	11 Unit
20	Sofa	3 Unit
21	Meja Kursi Staf	39 Unit
22	Meja Kursi Pejabat Eselon	15 Unit
23	Kompor Gas	1 Unit
24	Tabung Gas	1 Unit
25	Peralatan laboratorium	1 Paket
26	Telepon	1 Unit
27	Kursi Rapat	37 Unit
28	Mesin fax	1 Unit
29	Camera Digital	3 Unit
30	Alat Gergaji Pohon	5 Unit

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang lingkungan hidup, berupaya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menyusun kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Untuk mendukung tugas Kepala Daerah di bidang lingkungan hidup, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

- Peningkatan kualitas SDM, pengelola lingkungan hidup, aparat, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat;
- Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- Peningkatan fasilitas penyelesaian permasalahan lingkungan;
- Peningkatan pemantauan dan upaya/pembinaan dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
- Peningkatan pengendalian kelestarian keanekaragaman hayati;
- Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung;
- Peningkatan Indeks kualitas Lingkungan Hidup;

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

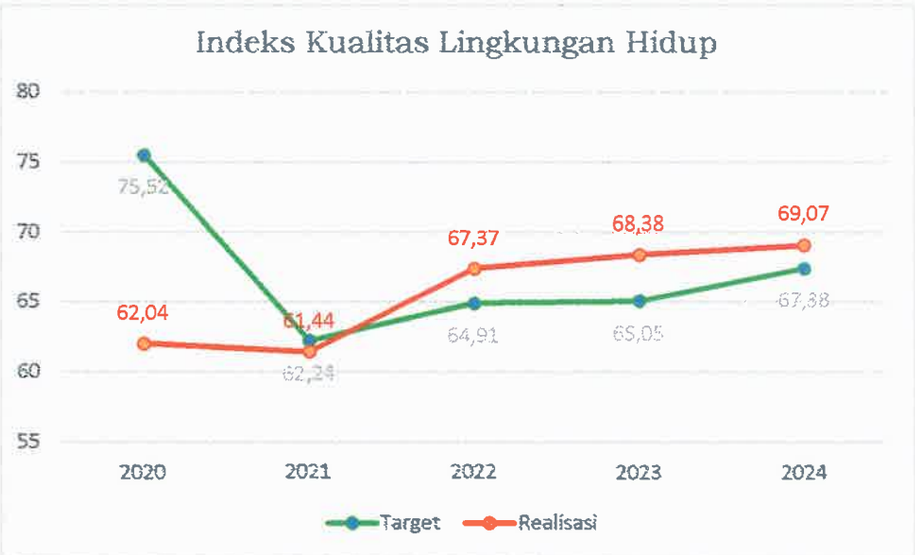
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah. IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Nganjuk cenderung dinamis namun masih berada di dalam kategori sedang (50<IKLH<70) sampai dengan baik (70<IKLH<90), sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2. 4 Tabel capaian IKLH Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2004

Tahun	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)			Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)			Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2020	68	56	82,35%	83,4	68,03	81,57%	75,26	62,08	82,49%	75,52	62,04	82,15%
2021	53,39	53,33	99,89%	80,52	78,84	97,91%	55,17	54,46	98,71%	62,24	61,44	98,71%
2022	53,49	61,61	115,18%	80,62	79,45	98,55%	55,44	54,91	99,04%	64,91	67,37	103,79 %
2023	53,59	60,67	113,21%	80,72	80,28	99,45%	55,72	55,31	99,26%	65,05	68,38	105,12 %
2024	59,51	56,25	94,52%	80,85	88,18	109,07%	55,99	55,74	99,55%	67,38	69,07	102,51 %

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2024;



➢ Ruang Terbuka Hijau

Tabel 2. 5 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Nganjuk Tchun 2022 – 2024

Tahun	Luas (Ha)			Persentase	
	Wilayah Perkotaan	RTH	Tutupan Vegetasi	RTH	Total RTH+Vegetasi
2022	16.998,55	21,117	(data tidak disajikan pada website https://ppkl.menlhk.go.id/)	0,12%	0,12%
2023	6.998,55	44,0789	65,0524	0,26%	0,64%
2024	16.998,55	51,4889	76,8154	0,30%	0,75%

Sumber: Dinas LH Kabupaten Nganjuk, 2024

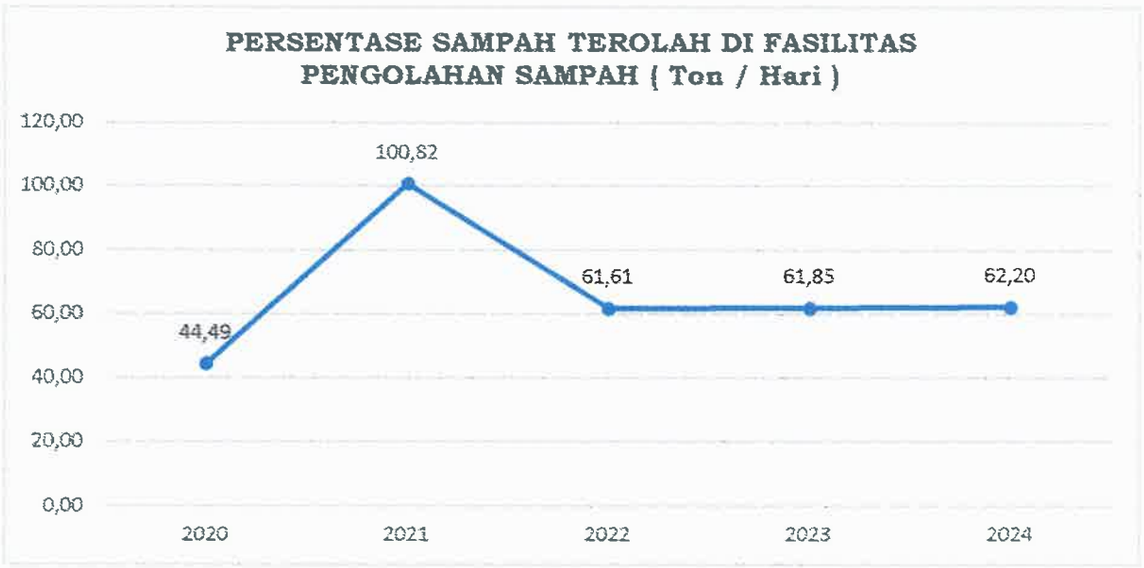
Pemerintah Kabupaten Nganjuk selalu berupaya meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Keberadaan RTH memiliki 3 fungsi yaitu fungsi ekologis, sosial-ekonomi, dan evakuasi. Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan pengatur iklim. RTH juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yaitu RTH mampu memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota. Sedangkan dalam fungsi evakuasi, RTH digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana alam.

➢ Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kinerja pengolahan sampah di wujudkan dengan pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah serta seberapa besar layanan pengumpulan sampah yang diberikan terhadap Rumah Tangga di Kabupaten Nganjuk. Adapun kinerja pengelolaan sampah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Kinerja Pengolahan Sampah di Fasilitas Pengolahan Sampah tahun 2020 sampai 2024

Uraian	2020 (Ton/Hr)	2021 (Ton/Hr)	2022 (Ton/Hr)	2023 (Ton/Hr)	2024 (Ton/Hr)
Timbulan sampah	437,76	443,87	444,13	446,81	457,80
sampah masuk TPS3R	55,36	74,81	74,82	75,75	75,92
sampah masuk Bank sampah	0,10	40,42	1,20	1,24	1,27
diambil oleh sektor informal	0,00	9,50	9,50	9,62	9,75
Residu TPS3R	10,97	23,91	23,91	24,75	24,74
Sampah Teroleh di Fasilitas Pengolahan Sampah	**44,49**	**100,82**	**61,61**	**61,85**	**62,20**
Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	**10,16%**	**22,71%**	**13,87%**	**13,84%**	**13,59%**



Tabel 2. 7 Area layanan Pengumpulan Sampah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	RT Terlayani	Desa	Kelurahan
1	Nganjuk	Mangundikaran, Kauman, Payaman, Begadung, Bogo, Cangkringan, Ganungkidul, Jatirejo, Kartoharjo, Ploso, Kramat, Ringinanom, Werungotok, Balongpacul, Kedungdowo	12975	3	13
2	Rejoso	Banjarejo, Mlorah, Mojorembun, Musirkidul, Musirlor, Ngadiboyo, Rejoso, Sambikerep, Sidokare, Talang, Talun	5431	11	
3	Gondang	Gondangkulon, Jaan	4200	2	
4	Bagor	Guyangan, Kedondong, Bagorkulon, Gemenggeng, Karangtengah, Petak, Paron	7219	5	2
5	Sukomoro	Sukomoro, Kapas	3519		2
6	Wilangan	Mancon, Ngadipiro, Ngudikan, Sudimoroharjo, Sukoharjo, Wilangan	2319	6	
7	Kertosono	Banaran, Bangsri, Drenges, Juwono, Kepuh, Kudu, Kutorejo, Lambangkuning, Nglawak, Pandantoyo, Pelem, Tembarak	12875	11	1
8	Tanjunganom	Tanjunganom, Warujayeng, Getas, Malangsari, Sidoharjo, Wates	23269	4	2
9	Lengkong	Lengkong, Jatipunggur, Jegreg	2500	3	
10	Baron	Gebangkerep, Jekek, Kemaduh	4150	3	
11	Sawahan	Bareng, Sawahan	2938	2	

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	RT Terlayani	Desa	Kelurahan
12	Pace	Cerme, Jampes, Jatigreges, Jetis, Pacekulon	5031	5	
13	Berbek	Kacangan, Ngrawan, Sengkut, Berbek	8294	4	
14	Ngetos	Ngetos, Kuncir	2869	2	
15.	Loceret	Candirejo, Gejagan, Loceret, Tekenglagahan	9706	4	
	JUMLAH RT TERLAYANI		107295	65	20

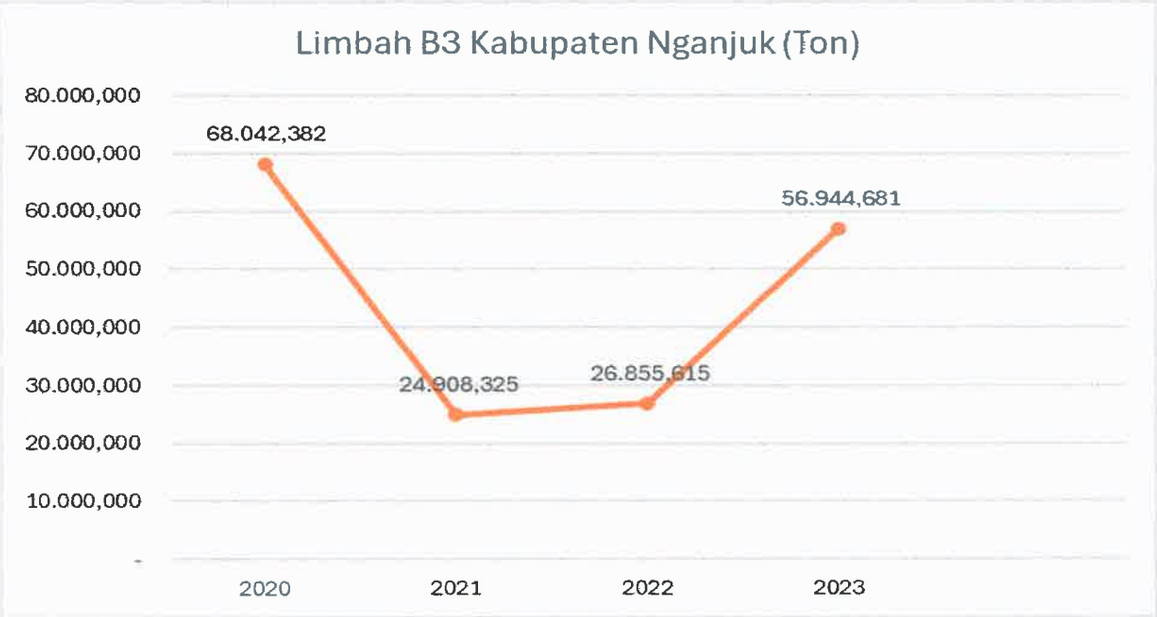
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk, 2024

Jumlah RT Terlayani	107.295
Jumlah RT Kab. Nganjuk	411.550
Persentase RT Terlayani	26,07%

Kinerja pengelolaan Limbah B3 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Pengelolaan Limbah B3 kabupaten Nganjuk

NO	Kecamatan	2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Badan Usaha	Total Limbah	Jumlah Badan Usaha	Total Limbah	Jumlah Badan Usaha	Total Limbah	Jumlah Badan Usaha	Total Limbah
1	Bagor	15	5,397	15	8,600	15	22,761	15	5,748
2	Baron	5	0,383	5	0,757	5	4,185	5	26,423
3	Berbek	2	0,431	2	1,274	2	1,711	2	0,463
4	Gondang	8	0,686	8	1,153	8	0,912	8	40,408
5	Jatikalen	2	0,150	2	0,337	2	0,228	2	0,122
6	Kertosono	12	227,806	12	208,632	12	58,528	12	55,368
7	Lengkong	8	7,838	8	8,212	8	1,827	8	80,230
8	Loceret	11	0,703	11	3,615	11	2,428	11	0,449
9	Nganjuk	19	67.558,899	19	24.090,471	19	25,353,757	19	39.925,152
10	Ngetos	1	0,306	1	0,611	1	0,310	1	0,386
11	Ngluyu	1	-	1	0,391	1	0,600	1	0,302
12	Ngronggot	5	0,617	5	0,390	5	0,310	5	645,570
13	Pace	3	1,598	3	1,297	3	1,342	3	0,549
14	Patianrowo	4	8,833	4	56,937	4	0,939	4	0,822
15	Prambon	3	1,030	3	520,250	3	1,297	3	0,701
16	Rejoso	6	225,117	6	2,086	6	1,413	6	1,397
17	Sawahan	4	0,075	4	0,876	4	0,752	4	1,020
18	Sukomoro	7	0,609	7	0,890	7	0,375	7	16.157,244
19	Tanjunganom	9	1,711	9	1,147	9	1.401,125	9	1,937
20	Wilangan	1	0,193	1	0,399	1	0,815	1	0,390
	TOTAL	**126**	**68.042,382**	**126**	**24.908,325**	**126**	**26.855,615**	**126**	**56.944,681**



➢ Penurunan emisi gas rumah kaca

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca diperoleh dari perhitungan pada aplikasi AKSARA berdasarkan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kabupaten nganjuk. Adapun kinerja penurunan emisi gas rumah kaca disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Capaian Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sampai Dengan Tahun 2024

Sektor	Sub Sektor	Jumlah Aksi Kegiatan	Penurunan Emisi Kumulatif (Ton CO2Eq)
Energi	Energi	24	1.799,04
	Transportasi	66	37.986,80
Pengelolaan Limbah	Air Limbah	101	805,38
	Persampahan	436	41.849.94
Lahan	Pertanian	61	88.228,13
	Kehutanan	43	92.934,96
TOTAL		**731**	**263.561,09**

Sumber: Bappenas, 2024

Adapun kontribusi penurunan emisi GRK untuk masing-masing sub bidang aksi kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut.

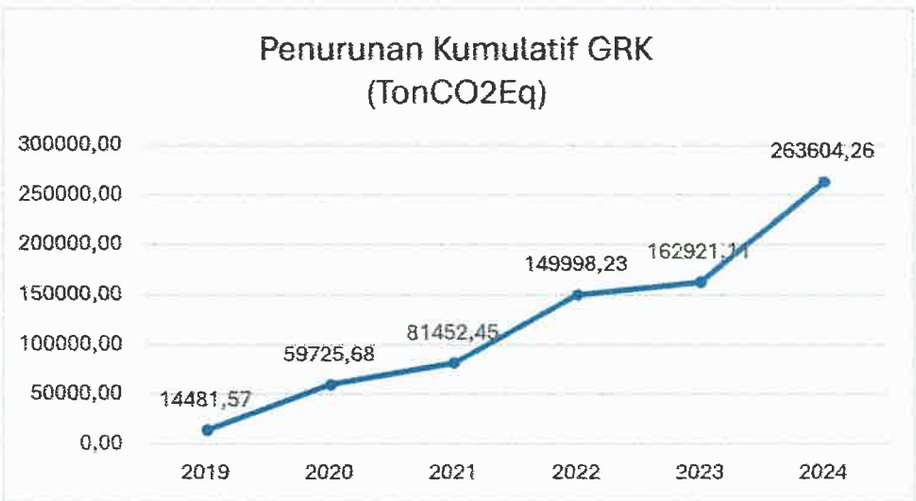
Tabel 2. 10 Kontribusi Per Sub Bidang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kab. Nganjuk

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Energi	421,87	601,43	854,97	1.035,28	1.799,04
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Transportasi	14.316,99	16.375,22	36.446,77	37.399,75	37.986,79
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Air Limbah	378,96	499,42	583,01	690,51	805,38
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Persampahan	0,00	17.992,49	23.971,16	35.297,02	41.849,94
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Pertanian	44.955,36	45949,76	87.833,46	88.175,10	88.228,13
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Kehutanan	0	0	308,86	323,44	92.934,96

Sumber: Bappenas, 2024

Tabel di atas merupakan hasil *input* kegiatan yang berkontribusi pada pengurangan GRK pada aplikasi aksara mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 .

Kontribusi penurunan gas rumah kaca yang dihasilkan dari aksi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk disajikan pada grafik berikut:



Sumber: *Sumber: Bappenas, 2024*

Dalam rangka evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 berdasarkan RENSTRA periode 2024-2026 maka perlu dihitung pencapaian kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk tahun 2024. Sebagai dasar dalam penentuan kebijakan perencanaan periode selanjunya. Adapun hasil evaluasi berdasarkan data dari Kementerian Lingkunan Hidup Dan Kehutanan yang dilaporkan pada website https://ppkl.menlhk.go.id/ dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indeks kualitas air dengan target pada renstra sebesar 59,51 terealisasi 56,25 dengan capaian kinerja sebesar 94,52 % sehingga masih belum memenuhi target.

  Upaya yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan kuailitas air yaitu dengan menjaga kelestarian sumber mata air dengan melakukan penanaman pohon di sekitar kawasan sumber mata air dan melakukan pengawasan terhadap pencemaran air.

- Pada target indeks kualitas udara dengan target pada renstra sebesar 80,85 terealisasi 88,18 dengan capaian kinerja sebesar 109,07 %.

  Upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemenuhan target yaitu dengan melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon tepi jalan, hutan kota dan taman, sehingga perpengaruh pada kuaitas udara.

- indeks tutupan lahan dengan target pada renstra sebesar 55,99 terealisasi 55,74 dengan capaian kinerja sebesar 99,55 %.

Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan terdapat dua indikator yaitu:

- Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pada tahun 2024 yaitu dengan target sebesar 50,20 % dengan realisasi 56,82 % dengan capaian kinerja sebesar 113,18 %.

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:

Timbulan sampah	*42.587 ton/tahun*
Target penanganan sampah (ton/tahun)	*21.379 ton*

Persentase target penanganan	*50,20 %*
Realisasi penanganan sampah	*24.196 ton/tahun*
Persentase realisasi penanganan	*56,82 %*
Capaian penanganan (target/ realisasi(ton))	*88,35 %*
Persentase Capaian kinerja	*113,18 %*

Sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 56,82 % artinya realisasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayah perkotaan sudah memenuhi target / tercapai.

- Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R, pada tahun 2024 yaitu dengan target sebesar 5,30 % dengan realisasi 8,40 % dengan capaian kinerja sebesar 148,40%.

Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R terdiri dari:

Volume timbulan sampah	*42.587 ton/tahun*
Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R (ton)	*2.257,12 ton*
Target pengurangan sampah	*5,30 %*
Realisasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R (ton)	*3.577,11 ton/tahun*
Capaian persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R	*8,40 %*
Capaian kinerja	*158,48 %*

Sehingga capaian kinerja tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 8,40 % artinya realisasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R sudah memenuhi target / tercapai.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Pemenuhan RTH perkotaan, dengan indikator Persentase peningkatan RTH perkotaan pada tahun 2024 yaitu dengan target sebesar 1,08 % dengan realisasi 1,21 % dengan capaian kinerja sebesar 112,42 %, Peningkatan RTH perkotaan terdiri dari :

Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk	9.606,10 Ha
Luas RTH perkotaan yang seharusnya ada (20%)	1.921,22 Ha
Luas RTH perkotaan sampai tahun 2023	21,80 Ha
Luas RTH perkotaan penambahan tahun 2024	
Dengan rincian sebagai berikut :	
- Hutan kota 0 Ha	0
- Taman Kota seluas	0
- Sempadan sungai dan jalan	0
- Penanaman pohon tepi jalan	1,53
Luas RTH perkotaan sampai tahun 2024	23,33 Ha
Peningkatan prosentase RTH	1,21 %
Target Peningkatan RTH perkotaan tahun 2024	1,08
Capaian kinerja	112,42 %

Sehingga capaian kinerja tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 1,21 % artinya realisasi Peningkatan RTH perkotaan sudah memenuhi target / tercapai.

Dalam perencanaan periode 2025-2029 evaluasi kinerja terhadap pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau mencakup wilayah seluruh kabupaten nganjuk.

Tabel 2. 11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2021	2022	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A.	Indeks kualitas air				53,39	53,49		59,51	54	61,61		56,25	78,26	115,18		94,52
B.	Indeks kualitas udara				80,52	80,62		80,85	78,84	79,45		88,18	93,96	98,54		109,07
C.	Indeks kualitas lahan				55,17	55,44		55,99	54,99	54,91		55,74	72,82	99,04		99,55
D.	Penanganan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga				74	73	72	50,20	71,28	66,64	67,26	56,82	96,32	91,29	93,42	113,18
E.	Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga melalui 3R				24	26	27	5,30	22,51	27,29	26,10	8,40	93,79	104,95	96,67	158,48
F.	Peningkatan RTH perkotaan				58	59		1,08	52,46	52,46	60	52,47	90,44	88,91	87,45	112,48

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026.

Tabel 2. 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

Uralan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SEBELUM PERUBAHAN														
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	571.965.000	537.212.400			534.935.083,00	462.372.874,00			93,53	86,07			1.109.177.400,00	997.307.957,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.032.160.750	1.890.649.675			1.837.298.670,00	1.863.004.949,52			90,41	98,54			3.922.810.425,00	3.700.303.619,52
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.400.000	7.200.000			5.800.000,00	5.600.000,00			90,63	77,78			13.600.000,00	11.400.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.000.000	30.000.000			18.954.000,00	26.263.000,00			99,76	87,54			49.000.000,00	45.217.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT		5.486.449.525				5.381.629.237,46				98,09			5.486.449.525,00	5.381.629.237,46
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN, PERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN	6.718.000.000	5.131.657.850			5.818.414.394,00	4.980.189.287,31			86,61	97,05			11.849.657.850,00	10.798.603.681,31
PROGRAM PENATAAN DAN PENATAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN		514.677.700				356.183.100,00				69,21			514.677.700,00	356.183.100,00
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA UPTD		298.735.375				272.674.765,00				91,28			298.735.375,00	272.674.765,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	330.000.000				282.273.600,00				85,54				330.000.000,00	282.273.600,00

Tabel 2. 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000				268.679.100,00				89,56				300.000.000,00	268.679.100,00
PROGRAM PERCEPATAN PEMULIHAN PENANGANAN SUMBER DAYA AIR KAWASAN KRITIS DAN RAWAN BENCANA	275.000.000				177.745.340,00				64,63				275.000.000,00	177.745.340,00
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.467.500.000				1.382.367.423,00				94,20				1.467.500.000,00	367.423,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU	9.816.658.000				8.922.933.436,73				90,90				9.816.658.000,00	22.933.436,73
SESUDAH PERUBAHAN														
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			11.132.937.350	13,479,906,350			9.855.311.947	12.676.344.479			88,52	93,69	24.662.843.700	22.531.656.426
Perencanaan Lingkungan Hidup			108.000.000	799,084,000			107.840.700	715.642.626			99,3	89,56	907.084.000	823.483.326
Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.998.117.700	728,266,673			1.939.535.723	673.914.579			97,06	92,54	2.726.384.373	2.613.450.302
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			3.643.084.300	10,199,991,863			3.559.024.996	9.496.512.088			97,69	93,10	13.843.076.163	13.055.537.084

Tabel 2. 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (limbah B3)			60.913.000	295,000,000			57.530.800	157.698.457			94,44	53,46	355.913.000	215.229.257
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			14.719.950	108,747,000			14.596.400	61.308.800			99,16	56,38	123.466.950	75.905.200
Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat			64.172.000	129,400,000			56.332.700	116.237.200			87,78	73,93	193.572.000	172.569.900
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			17.573.250	45,000,000			16.755.240	20.569.000			95,34	45,71	62.573.250	37.324.240
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			75.525.300	175,000,000			66.399.500	136.481.582			87,91	77,99	250.525.300	202.881.082
Program Pengelolaan Persampahan			4.159.999.600	7,089,276,820			4.002.453.288	6.826.131.461			96,21	96,29	11.249.276.420	10.828.584.749

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup antara lain yaitu:

- Pelaku usaha dalam hal pengawasan dan rekomendasi izin usaha terhadap dampak lingkungan
- Masyarakat dalam hal pelayanan penanganan dan pengelolaan persampahan
- Rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan dalam hal pengelolaan Limbah B3/medis
- Masyarakat dalam hal pengendalian dampak lingkungan terhadap media air, udara dan lahan
- Masyarakat dalam hal pegelolaan ruang terbuka hijau.

e. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Kinerja Pelayanan	**Nama Mitra PD**	**Bentuk Sinergi PD**
1.Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pertanian 3. Dinas PUPR	Pelaporan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca
2.Pengelohan Sampah	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas PMD 3. Dinas PUPR 4. Kecamatan/Kelurahan 5.Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.Peran serta siswa dalam partisipasi terhadap pengelolahan sampah 2.Fasilitasi pembentukan bank sampah 3.Penyediaan prasarana pengelolaan sampah 4.Pengelolaan sampah di area pasar
3.Penanganan pengaduan terhadap pengelolaan lingkungan Hidup	1. Satpol PP 2. DMPTSP	fasilitasi penanganan pengaduan terhadap pengelolaan lingkungan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan :

- Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang
- Menurunnya potensi sumber daya alam
- Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan

- Adanya pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan perusakan lingkungan
- Perubahan iklim yang mengancam kenyamanan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Peluang :

- Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerja industri dan masyarakat seperti Program Adipura, Adiwiyata, Kelurahan/Desa Sehat (Berseri), Proklim, Pusaka Lingkungan, Eco Pesantren, Kalpataru/PFLH.
- Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah, pelaku usaha/kegiatan dan pemerhati lingkungan dan peran serta masyarakat.
- Adanya dukungan program, Kegiatan dan anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan yang muncul Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	• Kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan • Perlu adanya regulasi/aturan tambahan
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan	• Keterbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
		RTH yang ada belum memenuhi standar teknis	• Keterbatasan lahan, Lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan RTH

		Regulasi dan dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu *diupdate*	• Kurangnya ketaatan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku • Perlu adanya regulasi/aturan tambahan

b. Perumusan isu Strategis

Tabel 2. 14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasinal	Regional	
Terdapat Lembaga pengolahan sampah di Tingkat desa (bank sampah)	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	pengelolaan sampah dari sumber hingga pembuangan akhir	Pemberdayaan Masyarakat dan Akses terhadap Sumber Daya	Pengelolaan sumber daya alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Sarana prasarana pengelolaan sampah mulai dari sumber sampai pemrosesan akhir	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	1. Pengelolaan sampah berbasis gender, mulai dari dari sampah 2. rumah tangga dengan metode pemisahan sampah organic dan 3. anorganic dan pengolahan yang bermanfaat secara ekonomi 4. Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien 5. Perlunya upaya peningkatan pengelolaan sampah 6. Perlu strategi pengelolaan sampah yang menguntungkan 7. Persentase sampah perkotaan yang tertangani belum mencapai Target 8. Rendahnya pengelolaan sampah dari sumber	Pengelolaan Limbah yang Efektif. Konsep ekonomi sirkular menjadi solusi dalam mengelola limbah secara berkelanjutan. Pendekatan seperti recycling (daur ulang), upcycling (pemanfaatan ulang dengan peningkatan nilai), serta biodegradasi (pengolahan limbah secara alami) dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.	Pencemaran Lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan persampahan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasinal	Regional	
		hingga pembuangan akhir				
Tersediany a RTH yang terkelola	Belum terpenuhinya RTH publik perkotaan	1. Prosentasi RTH masih rendah 2. Tindakan tegas terpadu pengembang terkait RTH 3. Belum terpenuhiny a luasan RTH 4. Pengelolaan hutan dan RTH 5. Penetapan lahan terbuka hijau dipetakan disosialisasi kan termasuk sabuk hijau	Konservasi dan Reboisasi. Praktik-praktik seperti reboisasi, agroforestri, dan pertanian regeneratif dapat membantu menyerap karbon dari atmosfer. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang dapat membantu menyeimbangkan emisi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju Net Zero Emission	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Penyediaan RTH publik yang memenuhi standar teknis
	RTH yang ada belum memenuhi standar teknis					
Tersediany a dokumen lingkungan	Regulasi dan dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu diupdate		Peningkatan kebijakan perlindungan lingkungan, dengan memperketat regulasi terkait deforestasi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sampah dan limbah industri.	Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Percepatan penyusunan dan *updating* regulasi dan dokumen perencanaan lingkungan hidup

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan kinerja. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup											
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	69.07	72.61	72.69	72.77	72.84	72.92	73.00	
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	88.18	78.26	78.36	78.46	78.56	78.66	78.76	
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (Indeks)	56.25	70.80	70.90	71.00	71.10	71.20	71.30	
		Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	55.74	65.27	65.27	65.27	65.27	65.27	65.27	
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah tertangani (%)	40.02	41.52	43.02	44.52	46.02	47.52	49.02	
		Meningkatnya ketaatan persetujuan lingkungan	Persentase ketaatan terhadap rekomendasi lingkungan (%)	63.33	64.52	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan sasaran dan strategi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, IK: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatnya Kualitas Air	* Pemantauan kualitas air
		* Terjaganya kelestarian sumber mata air
	2 Meningkatnya Kualitas Udara	* Pemantauan kualitas udara
	3 Meningkatnya Kualitas Lahan	* Meningkatkan luas ruang terbuka hijau
	4 Meningkatnya Pengelolaan sampah	* Tertanganinya area layanan persampahan
		* Menurunnya volume pembuangan sampah di TPA
	5 Meningkatnya ketaatan persetujuan lingkungan	Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat terkait lingkungan

Pada bagian ini juga dikemukakan rumusan penahapan Renstr PD sebagaimana tabel berikut

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau
Meningkatan layanan pengumupalan rumah tangga	Meningkatan layanan pengumupalan rumah tangga	Meningkatan layanan pengumupalan rumah tangga	Meningkatan layanan pengumupalan rumah tangga	Meningkatan layanan pengumupalan rumah tangga

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daearah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang memiliki dampak terhadap kualitas air	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Meningkatkan kelestarian sumber mata air dan konsevasi Sumber Daya Alam	
3	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang memiliki dampak terhadap kualitas udara	
4	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri agaria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau		Peningkatan luas dan pengelolaan ruang terbuka hijau	
5	Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah		Meningkatnya penanganan area layanan persampahan	
6			Terkelolanya sampah mulai dari sumbernya	
7			Terkelolanya sampah melalui kegiatan pemilahan / pengurangan sampah	
8	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Terselesaikannya kasus lingkungan	

Tabel 3. 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, IK: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	69,07	72.61	72.69	72.77	72.84	72.92	73.00
			1. Meningkatnya ketaatan persetujuan lingkungan	Persentase ketaatan terhadap rekomendasi lingkungan	%	63,33	64.52	64,52	65,63	65,63	65,63	65,63
			2. Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air	Indeks	56,25	70.80	70,90	71,00	71,10	71,20	71,30
			3. Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks kualitas udara	Indeks	88,18	78.26	78,36	78,46	78,56	78,66	78,76
			4. Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks kualitas lahan	Indeks	55,74	65.27	65,27	65,27	65,27	65,27	65,27
			5. Meningkatnya Pengelolaan sampah	Persentase timbulan sampah tertangani	%	40.02	41.52	43,02	44,52	46.02	47,52	49,02

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;

4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemenrintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan dokumen perancanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
b. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h. Penatausahaan arsip dinamis SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pengadaan Alat Besar
d. Pengadaan Mebel
e. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
e. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya

4.1.2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

a. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak Resiko Lingkungan

4.1.3 Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
c. Laboratorim Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pengelolaan

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat

4.1.4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati lainnya
d. Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati

4.1.5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan:

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Verifikasi lapangan untuk memastikan Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Penyimpanan sementara limbah B3

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam satu tahun daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan Pengolahan dan atau Penimbunan

4.1.6 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

4.1.7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

4.1.8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.1.9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/kota

Sub kegiatan :

a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota

4.1.10 Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Pengelolaan sampah

Sub kegiatan:

a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
b. Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesn akhir sampah di TPA/TPST/SPA
c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten /kota

Adapun Teknik dalam merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Pintu Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup							
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Udara			Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
			Penurunan emisi GRK		Penurunan Emisi GRK kumulatif (Ton CO2 Eq) (TON CO2 EQ)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksanannya Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Terlaksanannya Pemantauan penanggulangan Kualitas Udara	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
		Meningkatnya Kualitas Air			Indeks Kualitas Air (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pengelolaan limbah industri		Persentase limbah industri yang terkelola (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Jumlah laporan dari usaha dan / atau kegiatan yang di di awasi dan dibina	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
		Meningkatnya Kualitas Lahan			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
			Meningkatnya pemenuhan RTH		Persentase RTH memenuhi standar teknis (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Meningkatnya Luas RTH	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah			Persentase timbulan sampah tertangani (%)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan penunjang kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pengelolaan limbah B3		Persentase Limbah B3 yang Terkelola ()	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Jumlah laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 satu daerah kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah		persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				volume sampah yang terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
					Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	
			Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Meningkatnya Layanan Pengumpulan Sampah	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Meningkatnya ketaatan persetujuan lingkungan			Persentase ketaatan terhadap rekomendasi lingkungan (%)		
			Meningkatnya efektifitas perencanaan lingkungan hidup		Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup		Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (%)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				jumlah lembaga yang mendapatkan penghargaan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya fasilitasi terhadap pengaduan lingkungan hidup		Persentase fasilitasi terhadap pengaduan LH (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	

Rencana Program Dinas Lingkungan Hidup pada RENSTRA Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					32.445.000.000,00		32.445.000.000,00		32.445.000.000,00		32.615.000.000,00		32.785.000.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.015.000.000,00		18.015.000.000,00		18.015.000.000,00		18.015.000.000,00		18.015.000.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,5	80,5	80,5	18.015.000.000,00	80,6	18.015.000.000,00	80,7	18.015.000.000,00	80,7	18.015.000.000,00	80,7	18.015.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya efektifitas perencanaan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	80	80	80	600.000.000,00	80	600.000.000,00	80	600.000.000,00	80	600.000.000,00	80	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARCET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penurunan emisi GRK	Penurunan Emisi GRK kumulatif (Ton CO2 Eq) (TON CO2 EQ)	263.561,09	268.883,65	274.261,33	930.000.000,00	279.746,56	930.000.000,00	285.341,49	930.000.000,00	291.048,32	930.000.000,00	296.869,28	930.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00	
Meningkatnya pemenuhan RTH	Persentase RTH memenuhi standar teknis (%)	0,570	0,576	0,578	4.050.000.000,00	0,580	4.050.000.000,00	0,582	4.050.000.000,00	0,584	4.050.000.000,00	0,586	4.050.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		640.000.000,00		680.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	78	79,5	80	600.000.000,00	81,5	600.000.000,00	82	600.000.000,00	83,5	640.000.000,00	84	680.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		280.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan limbah industri	Persentase limbah industri yang terkelola (%)	41,76	43,75	44,56	200.000.000,00	47,89	200.000.000,00	51,02	200.000.000,00	54,45	240.000.000,00	58,17	280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		630.000.000,00		660.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7,25	7,73	8,21	600.000.000,00	8,68	600.000.000,00	9,16	600.000.000,00	9,64	630.000.000,00	10,11	660.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		280.000.000,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (%)	7,54	8,02	8,49	200.000.000,00	8,97	200.000.000,00	9,45	200.000.000,00	9,92	240.000.000,00	10,40	280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00	
Meningkatnya fasilitasi terhadap pengaduan lingkungan hidup	Persentase fasilitasi terhadap pengaduan LH (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	100	240.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					7.050.000.000,00		7.050.000.000,00		7.050.000.000,00		7.050.000.000,00		7.050.000.000,00	
Meningkatnya pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah	persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	23,85	24,81	25,76	3.525.000.000,00	26,71	3.525.000.000,00	27,66	3.525.000.000,00	28,61	3.525.000.000,00	29,56	3.525.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	28,07	28,27	28,47	3.525.000.000,00	28,67	3.525.000.000,00	28,87	3.525.000.000,00	29,07	3.525.000.000,00	29,27	3.525.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL KESELURUHAN					32445000000.00		32445000000.00		32445000000.00		32615000000.00		32785000000.00	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				32.445.000.000,00		32.445.000.000,00		32.445.000.000,00		32.615.000.000,00		32.785.000.000,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.015.000.000,00		18.015.000.000,00		18.015.000.000,00		18.015.000.000,00		18.015.000.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,5	80,5	18.015.000.000,00	80,6	18.015.000.000,00	80,7	18.015.000.000,00	80,7	18.015.000.000,00	80,7	18.015.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersusunya dokumen perencanaan, penggangaran, evaluasi kinerja dan data kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.010.000.000,00		9.010.000.000,00		9.010.000.000,00		9.010.000.000,00		9.010.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	81	9.000.000.000,00	81	9.000.000.000,00	81	9.000.000.000,00	81	9.000.000.000,00	81	9.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	81	9.000.000.000,00	81	9.000.000.000,00	81	9.000.000.000,00	81	9.000.000.000,00	81	9.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terpenuhinya kebutuhan penunjang kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94	94	75.000.000,00	94	75.000.000,00	94	75.000.000,00	94	75.000.000,00	94	75.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94	94	75.000.000,00	94	75.000.000,00	94	75.000.000,00	94	75.000.000,00	94	75.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	43	100.000.000,00	43	100.000.000,00	43	100.000.000,00	43	100.000.000,00	43	100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	24	7.000.000,00	24	7.000.000,00	24	7.000.000,00	24	7.000.000,00	24	7.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	43	100.000.000,00	43	100.000.000,00	43	100.000.000,00	43	100.000.000,00	43	100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	24	7.000.000,00	24	7.000.000,00	24	7.000.000,00	24	7.000.000,00	24	7.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.985.000.000,00		3.985.000.000,00		3.985.000.000,00		3.985.000.000,00		3.985.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				455.000.000,00		455.000.000,00		455.000.000,00		455.000.000,00		455.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550	550	5.000.000,00	550	5.000.000,00	550	5.000.000,00	550	5.000.000,00	550	5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550	550	5.000.000,00	550	5.000.000,00	550	5.000.000,00	550	5.000.000,00	550	5.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.950.000.000,00		3.950.000.000,00		3.950.000.000,00		3.950.000.000,00		3.950.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	30	2.000.000.000,00	30	2.000.000.000,00	30	2.000.000.000,00	30	2.000.000.000,00	30	2.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	30	2.000.000.000,00	30	2.000.000.000,00	30	2.000.000.000,00	30	2.000.000.000,00	30	2.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Meningkatnya efektifitas perencanaan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	80	80	600.000.000,00	80	600.000.000,00	80	600.000.000,00	80	600.000.000,00	80	600.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penurunan emisi GRK	Penurunan Emisi GRK kumulatif (Ton CO2 Eq)	26356109	27426133	930.000.000,00	27974656	930.000.000,00	28534149	930.000.000,00	29104832	930.000.000,00	29686928	930.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksanannya Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	40	40	350.000.000,00	40	350.000.000,00	40	350.000.000,00	40	350.000.000,00	40	350.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	40	40	350.000.000,00	40	350.000.000,00	40	350.000.000,00	40	350.000.000,00	40	350.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksanannya Pemantauan penanggulangan Kualitas Udara	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan RTH	Persentase pemenuhan RTH	0.570	0.578	4.050.000.000,00	0.580	4.050.000.000,00	0.582	4.050.000.000,00	0.584	4.050.000.000,00	0.586	4.050.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Luas RTH	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	15	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	147.98	148.98	3.000.000.000,00	149.48	3.000.000.000,00	149.98	3.000.000.000,00	150.49	3.000.000.000,00	150.99	3.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	147.98	148.98	3.000.000.000,00	149.48	3.000.000.000,00	149.98	3.000.000.000,00	150.49	3.000.000.000,00	150.99	3.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	15	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	15	500.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		640.000.000,00		680.000.000,00		
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	78	80	600.000.000,00	81.5	600.000.000,00	82	600.000.000,00	83.5	640.000.000,00	84	680.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		640.000.000,00		680.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Jumlah laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 satu daerah kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	640.000.000,00	1	680.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		640.000.000,00		680.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	640.000.000,00	1	680.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		280.000.000,00		
Meningkatnya pengelolaan limbah industri	Persentase limbah industri yang terkelola	41.76	44.56	200.000.000,00	47.89	200.000.000,00	51.02	200.000.000,00	54.45	240.000.000,00	58.17	280.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		280.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Jumlah laporan dari usaha dan / atau kegiatan yang di di awasi dan dibina	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	240.000.000,00	1	280.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		280.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	240.000.000,00	1	280.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		630.000.000,00		660.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7,25	8,21	600.000.000,00	8,68	600.000.000,00	9,16	600.000.000,00	9,64	630.000.000,00	10,11	660.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		630.000.000,00		660.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	2	220.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	2	220.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	210.000.000,00	50	220.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	2	220.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	210.000.000,00	50	220.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	2	220.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		280.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	7,54	8,49	200.000.000,00	8,97	200.000.000,00	9,45	200.000.000,00	9,92	240.000.000,00	10,4	280.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		280.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
jumlah lembaga yang mendapatkan penghargaan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	240.000.000,00	5	280.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		280.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	240.000.000,00	5	280.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		
Meningkatnya fasilitasi terhadap pengaduan lingkungan hidup	Persentase fasilitasi terhadap pengaduan LH	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	100	240.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	240.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	240.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				7.050.000.000,00		7.050.000.000,00		7.050.000.000,00		7.050.000.000,00		7.050.000.000,00		
Meningkatnya pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah	persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	13.59	13.69	3.525.000.000,00	13.74	3.525.000.000,00	13.79	3.525.000.000,00	13.84	3.525.000.000,00	13.89	3.525.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				3.525.000.000,00		3.525.000.000,00		3.525.000.000,00		3.525.000.000,00		3.525.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
volume sampah yang terkelola	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	500	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1000	1000	2.575.000.000,00	1000	2.575.000.000,00	1000	2.575.000.000,00	1000	2.575.000.000,00	1000	2.575.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				2.575.000.000,00		2.575.000.000,00		2.575.000.000,00		2.575.000.000,00		2.575.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1000	1000	2.575.000.000,00	1000	2.575.000.000,00	1000	2.575.000.000,00	1000	2.575.000.000,00	1000	2.575.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	500	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	26.07	26.13	3.525.000.000,00	26.16	3.525.000.000,00	26.19	3.525.000.000,00	26.22	3.525.000.000,00	26.25	3.525.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				3.525.000.000,00		3.525.000.000,00		3.525.000.000,00		3.525.000.000,00		3.525.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Layanan Pengumpulan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	500	500	3.425.000.000,00	500	3.425.000.000,00	500	3.425.000.000,00	500	3.425.000.000,00	500	3.425.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				3.425.000.000,00		3.425.000.000,00		3.425.000.000,00		3.425.000.000,00		3.425.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	500	500	3.425.000.000,00	500	3.425.000.000,00	500	3.425.000.000,00	500	3.425.000.000,00	500	3.425.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup. Beberapa subkegiatan prioritas yang dapat dilakukan meliputi penguatan dukungan sarana dan prasarana Pelestarian lingkungan hidup dan penanganan, pengendalian dan penanggulangan sampah, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4 Teknik Penyusunan Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Unggulan Kepala Daerah

No	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
1	Melestarikan Seni Budaya Dan Kearifan Lokal Serta Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan	

No	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Kordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Pemenuhan RTH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Meningkatnya Pengelolaan Limbah Industri	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan	

No	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup	
				Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam	

No	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pengolahan Sampah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Pengelolaan Sampah	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Pengelolaan Sampah	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektifitas perencanaan lingkungan hidup	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
			2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
2.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan emisi GRK	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
3.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya pemenuhan RTH	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
4.	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
5.	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya pengelolaan limbah industri	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
6.	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kapasitasnya	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
			2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
7.	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	pengelolaan lingkungan hidup	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
8.	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya fasilitasi terhadap pengaduan lingkungan hidup	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
			2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
9.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
		Meningkatnya pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
		Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Meningkatnya pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah	2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD. Program Pembangunan Kabupaten Nganjuk, yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Nganjuk 2025-2029 diimplimentasikan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup									
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	69,07	72,61	72,69	72,77	72,84	72,92	73	
2.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,18	78,26	78,36	78,46	78,56	78,66	78,76	
3.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	55,74	65,27	65,27	65,27	65,27	65,27	65,27	
4.	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,25	70,8	70,9	71,0	71,1	71,2	71,3	
5.	Persentase timbulan sampah tertangani	%	40,02	41,52	43,02	44,52	46,02	47,52	49,02	
6.	Persentase ketaatan terhadap rekomendasi lingkungan	%	63,33	64,52	65,63	65,63	65,63	65,63	65,63	

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. dijelaskan tentang indikator kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sebagaimana tabel terlampir

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	positif	Indeks	69.07	72.61	72.69	72.77	72.84	72.92	72.98	
2.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	positif	%	63.33	64.52	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	
3.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	positif	%	93.95	93.98	93.99	94.00	94.05	94.08	94.10	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001